

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Bab 5 mengemukakan jawaban-jawaban permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah penelitian skripsi ini.

5.1 Simpulan

Perjalanan karir John Howard dalam kancah perpolitikan Australia dimulai dengan menjadi anggota parlemen untuk Divisi Bennelong. Setelah itu, ia berhasil memasuki jajaran menteri dengan menjadi *Minister For Business and Consumer Affairs*, *Minister For Special Trade Negotiations with the European Economic Community* dan *Treasurer*. Puncak karir politik John Howard adalah ketika ia berhasil menjadi Perdana Menteri Australia.

Peneliti menafsirkan bahwa keberhasilan John Howard menjadi Perdana Menteri Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah minat terhadap politik yang tumbuh sejak kecil, kekaguman kepada Perdana Menteri Bob Menzies, kedekatan politik dengan para tokoh penting di Partai Liberal (salah satunya Malcolm Fraser) dan loyalitas terhadap Partai Liberal. Faktor-faktor ini kemudian saling bersinergi untuk membuka jalan bagi John Howard untuk menjadi seorang perdana menteri.

Memang tidak seperti anak kecil pada umumnya, John Howard sudah dikenalkan dengan politik sejak ia masih menginjak usia dini. Keluarganya sangat sering mengadakan diskusi mengenai perpolitikan Australia maupun dunia di rumah. Tentu mudah bagi John Howard yang merupakan anak bungsu di keluarganya untuk dipengaruhi oleh diskusi-diskusi politik ini. Tanpa disadari, setelah ia tumbuh dewasa, politik ternyata ia pilih menjadi bidang yang ditekuni sebagai karirnya.

Faktor berikutnya yang memberikan dampak terhadap keberhasilan John Howard menjadi Perdana Menteri Australia adalah kekaguman yang dimilikinya kepada sosok Bob Menzies. Ia merupakan Perdana Menteri Australia dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah. Pada masa remajanya, John Howard sering menyaksikan Bob Menzies berpidato yang membuatnya begitu kagum. Hal ini semakin menguatkan ambisi John Howard untuk menjadi Perdana Menteri Australia seperti Bob Menzies. Pada akhirnya, terbukti bahwa John Howard menjadi Perdana Menteri Australia dengan masa jabatan terlama setelah Bob Menzies.

Kedekatan politik dengan Malcolm Fraser juga nyatanya memudahkan langkah John Howard menuju posisi perdana menteri. Fraser berperan penting pada awal karir politik John Howard di pemerintahan Australia. Ketika Fraser menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, ia menunjuk John Howard menjadi *Minister For Business and Consumer Affairs, Minister For Special Trade Negotiations with the European Economic Community*, bahkan hingga menjadi seorang *Treasurer*. Padahal, pengalaman John Howard dalam pemerintahan Australia dapat dikatakan masih cukup baru dan belum begitu lama. Posisinya sebagai seorang menteri hingga *treasurer* membuat sosok John Howard semakin dikenal oleh masyarakat Australia. Hal ini menjadi modal penting baginya untuk menjadi perdana menteri.

Keanggotaan John Howard selama puluhan tahun di Partai Liberal menjadi faktor yang penting pula dalam upaya memperoleh jabatan sebagai seorang perdana menteri. Loyalitasnya kepada Partai Liberal membuat John Howard terpilih sebagai ketua partai ini. Menjabat sebagai Ketua Partai Liberal memungkinkannya untuk mengikuti pemilihan umum Perdana Menteri Australia pada tahun 1996 yang mengantarkannya pada sebuah kemenangan.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard terhadap Indonesia di antaranya adalah Kebijakan Terkait Masalah Timor Timur, Kerja Sama Kontra-Terrorisme, Kebijakan *Pacific Solution* dan Pemberian Bantuan Bencana Tsunami di Aceh. Menurut penafsiran peneliti, kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard dalam menangani permasalahan Timor Timur dapat dikatakan berhasil. Ia berhasil memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan Timor Timur, yakni dengan mengusulkan hak untuk

Fatmawati, 2018

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JOHN HOWARD: HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA TAHUN 1996-2007

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Kebijakan ini berhasil menyelesaikan permasalahan Timor Timur yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kebijakan berikutnya adalah Kerja Sama Kontra-Terrorisme antara Australia dan Indonesia. Kebijakan ini dianggap tepat oleh peneliti mengingat terjadinya berbagai peristiwa terorisme berupa serangan bom yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bali. Peristiwa terorisme semacam ini tentunya dapat menjadi ancaman pula bagi Australia karena wilayahnya yang dekat dengan Indonesia. Kerja Sama Kontra-Terrorisme ini mengalami keberhasilan dibuktikan dengan tertangkapnya para pelaku pemboman di Bali.

Peneliti selanjutnya menafsirkan bahwa Kebijakan *Pacific Solution* yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard juga dapat dikatakan berhasil. Penerapan kebijakan ini sukses dalam mengurangi jumlah imigran ilegal yang masuk ke Australia melalui Indonesia. Maka dari itu, kekhawatiran Australia terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh imigran ilegal di negaranya menjadi berkurang. Sementara itu, kebijakan pemberian bantuan terhadap bencana tsunami di Aceh pun memperoleh suatu keberhasilan. Bantuan yang diberikan Australia, baik berupa dana untuk perbaikan infrastruktur yang rusak maupun bantuan medis untuk menolong korban luka-luka mampu memulihkan kembali wilayah yang terkena dampak akibat bencana tsunami tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh John Howard ini tentunya memberikan dampak bagi hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Dampak kebijakan-kebijakan ini membuat hubungan kedua negara membaik dan kurang baik. Membaiknya hubungan Australia-Indonesia dapat dilihat dari kebijakan John Howard dalam menyikapi ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia dan pemberian bantuan terhadap bencana tsunami yang terjadi di Aceh. Kedua kebijakan ini berhasil mempererat hubungan bilateral Australia-Indonesia dan meningkatkan kedekatan kedua negara. Selain itu, kedua kebijakan ini mampu menciptakan berbagai bentuk kerja sama baru dalam rangka mengadakan hubungan bilateral yang lebih positif. Ketika mengalami kesulitan, Indonesia dapat mengandalkan Australia sebagai tetangga terdekatnya begitupun sebaliknya.

Sementara itu, hubungan bilateral Australia-Indonesia kurang baik akibat sikap Perdana Menteri John Howard dalam menangani masalah Timor-Timur dan pemberian visa sementara kepada para pencari suaka (*asylum seekers*) asal Papua. Kebijakan-kebijakan ini telah menyentuh isu yang kompleks dalam hubungan bilateral kedua negara, yakni kedaulatan negara. Tindakan intervensi yang dilakukan Australia dalam memimpin pasukan INTERFET untuk menertibkan kerusuhan yang terjadi Timor Timur dianggap telah melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu pula dengan pemberian visa sementara kepada para pencari suaka asal Papua yang dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan bilateral Australia-Indonesia pada masa Perdana Menteri John Howard mengalami pasang-surut yang dinamis. Pasang-surut ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard terhadap Indonesia. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh John Howard sejalan dengan pemerintah Indonesia, maka hubungan kedua negara berada pada tren yang positif. Akan tetapi, ketika kebijakan yang dikeluarkan tersebut dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, maka tren hubungan kedua negara menjadi kurang baik.

5.2 Rekomendasi

Peneliti merekomendasikan skripsi ini untuk menjadi referensi sumber belajar bagi materi sejarah peminatan kelas XII pada kompetensi dasar 3.8 Mengevaluasi sejarah kontemporer dunia antara lain runtuhnya Uni Soviet, Jerman Bersatu, Konflik Kamboja, Perang Teluk, Apartheid di Afrika Selatan, Konflik Yugoslavia dan terorisme dunia bagi kehidupan sosial dan politik global. Selain itu, peneliti juga berharap skripsi ini mampu menambah khazanah penulisan sejarah kawasan Australia, khususnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard dan pengaruhnya terhadap pasang surut hubungan bilateral Australia-Indonesia.

Skripsi ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang akan mengkaji mengenai sejarah kawasan Australia, khususnya mengenai hubungan bilateral Australia-Indonesia pada masa perdana menteri John Howard.

Fatmawati, 2018

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JOHN HOWARD: HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA TAHUN 1996-2007

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal ini disebabkan masih banyak ranah yang belum sempat dieksplor lebih lanjut oleh peneliti. Berikut ini peneliti merekomendasikan beberapa aspek yang dapat dikaji lebih lanjut :

- a. Hubungan bilateral Australia-Indonesia masa perdana menteri John Howard pada bidang ekonomi.
- b. Hubungan bilateral Australia-Indonesia masa perdana menteri John Howard pada bidang sosial dan kebudayaan.
- c. Hubungan bilateral Australia-Indonesia masa perdana menteri John Howard pada bidang pendidikan.